

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai individu yang hidup dalam suatu lingkungan, manusia tidak akan pernah lepas dari kebutuhan akan orang lain, karena ada batasan dalam dirinya yang harus dilengkapi dengan kehadiran orang lain. Namun terkadang kebutuhan akan orang lain lebih karena kesamaan tujuan dan proses berpikir yang ingin dicapai. Hal ini membuat individu berusaha membentuk suatu ikatan untuk mengatasi setiap permasalahan dengan membangun suatu koneksi yang disebut dengan asosiasi atau kelompok. Setiap orang dalam asosiasi akan mengembangkan kapasitasnya untuk mencapai tujuan. Kelompok memiliki peran yang lebih besar untuk diperankan dalam mencapai tujuan daripada bekerja sendiri, karena orang tidak dapat menangani atau mengendalikan diri mereka sendiri.<sup>1</sup>

Kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Selain itu kelompok membangun solidaritas sesama warga desa. Sastraatmadja berpendapat bahwa setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi dalam pengembangan kelompok dengan segala potensi dan keterbatasan yang mereka miliki. Kelompok bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah terbiasa bekerja berkelompok dengan bentuk yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal yang

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Peranan Kelompok Tani Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik, 2016), h.1

ada. Berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri.<sup>2</sup>

Kelompok tani merupakan salah satu jenis media pembelajaran agraria (pertanian) desa, yang merupakan tempat untuk aktivitas produksi hasil tani pedesaan atau sebagai unit kreasi dimana ketua kelompok berfungsi sebagai pembimbing dan petani sebagai pelaksana proses produksi pertanian desa. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Kementerian Pertanian, kelompok tani adalah kegiatan sosial petani-petani, yang terdiri dari petani dewasa (laki-laki atau perempuan) dan petani muda (anak-anak atau wanita) yang diikat secara terbuka dalam suatu wilayah, berkumpul berdasarkan keserasian kebutuhan bersama dan berada dalam jangkauan kuasa ketua kelompok tani.<sup>3</sup>

Peranan kelompok tani, dilihat dari segi pembangunan yaitu menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada, sebagai media atau alat pembangunan, membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandate yang diamanatkan oleh kelompok. Kelompok tani juga berperan sebagai pengembangan pertanian dengan mengoptimalkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam upaya mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan petani. Sunarru Samsi Hariadi, Kelompok tani mempunyai unsur pengikat yaitu adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya dan memiliki kawasan usaha tani yang menjadi suatu tanggung jawab bersama diantara para anggotanya dengan kader tani untuk menggerakkan para petani sehingga kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya serta memiliki kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya dari sebagian besar anggotanya dan tidak terlepas dari adanya

---

<sup>2</sup>Donal Ariadi Siahaan, *Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa*, (Universitas Sumatra Utara Medan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2019), h. 1-2

<sup>3</sup>Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 76.

dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang suatu program yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem demokrasi membukaruang kepada masyarakat atau kelompok untuk terlibat dalam tindakan politik, keikutsertaan masyarakat/kelompok dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat/kelompok dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara.<sup>5</sup>

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Jadi dalam masyarakat demokratis yang memahami maknanya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip musyawarah akan saling mengisi dalam menuju kebenaran dan kebaikan bersama, tanpa memandang kelas atau stratifikasi serta punya pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat.<sup>6</sup> Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan. Atas dasar tersebut, masyarakat atau kelompok mempunyai kebebasan berpartisipasi dalam tindakan politik. Masyarakat dalam sebuah negara demokrasi memiliki andil besar terhadap arah visi dan misi negaranya yang tak lain mensejahterakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya tinggal diam dalam menentukan arah negara, oleh karena itu setiap insan negara berhak untuk ikut dalam partisipasi politik.<sup>7</sup> Dalam sejarah islam, kebiasaan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu menjadi rutinitas

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 2-3.

<sup>5</sup>Mochtar Mas' oed, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 43.

<sup>6</sup>Mardian Idris, *Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h.7

<sup>7</sup>A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 285.

yang selalu dilakoni Rasulullah dan para sahabatnya. Keputusan bermusyawarah selalu dijalani dengan ketaatan. Hasil bermusyawarah tak seorangpun berani untuk berkhianat.

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya disbanding Rasulullah.” (HR. Tirmidzi)<sup>8</sup>

Musyawarah yang benar yaitu musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan adalah dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis. Maka demokrasi, sebagai nama dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu perlu demokrasi dengan musyawarah sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas adanya stratifikasi sosial yang baku dan apriori dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.<sup>9</sup>

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik baginya adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang di buat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan masyarakat biasanya dibagi atas dua yaitu, mempengaruhi isi kebijakan umum, dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

---

<sup>8</sup><https://www.hidayatullah.com>. Diakses 25 Oktober 2022, pukul 12.24 WIB.

<sup>9</sup>Mardian Idris, *Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h.7

Partisipasi politik juga dijelaskan dalam Al- Qur'an yaitu pada QS. Yusuf ayat 55-56

yang berbunyi :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ (٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ  
يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya : Yusuf berkata " Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di Negeri Mesir; (Dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu, kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyalakan pahala orang – orang yang berbuat baik. (QS. Yusuf: 55-56).<sup>10</sup>

Penjelasan ayat di atas adalah bahwa manusia dianjurkan berpartisipasi dalam suatu kebijakan demi terciptanya suatu kemaslahatan dalam suatu masyarakat. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas.

Apabila kita golongan, masyarakat di Indonesia sudah termasuk sebagai kelompok anggota yang berpartisipasi aktif. Artinya bahwa sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan partisipasinya, baik sebagai bentuk kemauan, ketanggapan atau pengawasan terhadap suatu kebijaksanaan, serta memberikan suara dalam pemilihan umum. Menurut perkembangan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara dari satu tahun ke tahun lainnya, jumlahnya menunjukkan penurunan. Bagaimanapun, ini juga disertai dengan peningkatan jumlah individu tertentu dan kekritisan daerah dalam menanggapi kebijakan-kebijakan di Indonesia dalam sistem pemerintahan .<sup>11</sup>

Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga

---

<sup>10</sup>Al-Qur'an Terjemah KemenagRI, Asy-Syifaa', (Bandung: Sygma Examedia, 2019), cet ke-5. (QS Yusuf: 55-56).

<sup>11</sup>Ibid, h. 7.

Negara dalam mengenterprestasikan sejumlah symbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam symbol-symbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang symbol-symbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam aktifitas sikap dan prilaku.<sup>12</sup>

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, entitas social sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.<sup>13</sup>

Partisipasi kelompok tani menjadi satu wadah bagi para anggotanya untuk melakukan gerakan bersama dalam usaha pertanian. Gerakan ini umumnya dipacu untuk mempererat hubungan antar petani demi tercapainya tujuan bersama dengan cara para petani saling bertukar gagasan dan pengetahuan demi perkembangan pertanian. Selain itu, partisipasi kelompok tani juga merupakan wujud dari aktualisasi program aparatur desa juga menjadikan visi misi pemerintahan saat ini yaitu dalam hal ketahanan pangan dalam negeri. Oleh karenanya, keaktifan kelompok tani bisa menjadi satu tolak ukur partisipasi politik untuk melihat sejauh mana berkembangnya industri pertanian di suatu wilayah atau desa . Kelompok tani di desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong menjadi salah satu contoh dinamika yang menarik untuk diperbincangkan. Di desa ini, keaktifan kelompok dapat dilihat melalui kegiatan dan program

---

<sup>12</sup>Soemarsono,*Komunikasi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002) h 4-5.

<sup>13</sup>Purwo Santoso,*Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h.36.

yang dilaksanakan secara rutin. Menariknya, masyarakat di desa ini merasa, bahwa kelompok tani benar-benar dapat menjadi sarana pendorong peningkatan perekonomian petani.

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Memiliki luas 3.570,98 km<sup>2</sup> dengan populasi 363, 816 individu. Sejak berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2008 hingga 2022 telah terjadi 4 kali pergantian kepala daerah (Bupati), hal ini menunjukkan bahwa aktivitas politik di Kabupaten Labuhanbatu Utara cukup baik.<sup>14</sup>

Berdasarkan informasi dari kantor kepala desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Desa Pangkalan Lunang memiliki luas wilayah 16.868.649 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 4.107 jiwa, berdasarkan jumlah pemilih pada Pilkada tahun 2016 sebanyak 1.846 pemilih dan pilkada pada tahun 2020 sebanyak 3275 jiwa, dari informasi ini sangat mungkin untuk menduga bahwa jumlah pemilih di Desa Pangkalan Lunang telah berkembang dari satu tahun ke tahun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan politik individu Desa Pangkalan Lunang semakin meluas. Beranjak dari landasan di atas, penyusun mengangkat judul kajian, yaitu *"Peran kelompok tani desa pangkalan lunang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa Pangkalan Lunang pada Pemilu tahun 2020"* sebagai materi yang akan dikonsentrasikan lebih lanjut".<sup>15</sup>

Salah satu hal yang melatarbelakangi penelitian saya ini karena adanya suatu permasalahan mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat di desa ini, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan politik didesa setempat, contohnya pada saat pemilu

---

<sup>14</sup>Aplikasi *Badan Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara*, 2019, akses Google Playstore.

<sup>15</sup>Kantor Kepala Desa Pangkalan Lunang, Senin 7 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

masih banyak masyarakat yang tergolong golput, mereka lebih memilih pergi bertani dari pada harus pergi ke TPS, karena menurut mereka siapa pun yang akan menjadi pemimpin hidup mereka akan tetap menjadi petani, serta keekonomian Petani di Kecamatan Kualuh Leidong ini pun akan tetap sama dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Kehidupan petani di Kecamatan Kualuh Leidong ini tergolong memprihatinkan, karena hasil tani mereka terjual dengan harga yang sangat rendah disbanding dengan Kecamatan-kecamatan lain yang ada di Labura, salah satu factor yang mempengaruhi harga jual rendah adalah kondisi jalan yang sangat memprihatinkan rusak, licin, dan berlumpur. Sehingga mobil-mobil dan truk angkutan hasil tani masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong mengalami kesulitan untuk mengekspor hasil tani keluar daerah, hal tersebut mempengaruhi rendahnya harga jual hasil tani masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perincian masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong?
2. Bagaimana strategi/cara kelompok tani mempengaruhi masyarakat atau anggotanya dalam mewujudkan tindakan politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perincian masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong.
2. Untuk mengetahui strategi/cara kelompok tani mempengaruhi masyarakat atau anggotanya dalam mewujudkan tindakan politik.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Pengkajian ini diharapkan untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan. Khususnya untuk Ilmu Politik yang mengkaji fenomena politik atau fenomena social politik
- b) Sebagai bahan pemahaman tambahan dan tulisan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

### **2. Manfaat Pragmatis**

- a) Pengkajian ini diharapkan untuk mengonstruksi perhatian masyarakat untuk berperan serta secara efektif dalam partisipasi politik.
- b) Pengkajian ini diharapkan untuk menjadi bahan masukan bagi para tokoh politik tentang arti penting perluasan partisipasi politik, khususnya di Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong.

## **E. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan di lampirkan dibawah ini:

1. Skripsi oleh Veti Yulianti berjudul “*Peran Kelompok Tani Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Desa Tawang Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur*” tahun 2021.<sup>16</sup> Menyebutkan bahwa kelompok tani dapat berperan dalam memperbaiki partisipasi politik, melalui kampanye, sosialisasi politik, dan persiapan massa dalam masalah legislatif. Sedangkan Skripsi saya membahas tentang bagaimana peran kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik di Desa Pangkalan Lunang

---

<sup>16</sup>Veti Yulianti, *Peran Kelompok Tani Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Desa Tawang Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2021).

Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara serta bagaimana pengaruh setelah adanya kelompok tani di tengah tengah masyarakat dalam berpartisipasi politik.

2. Skripsi oleh Hamim Suyanto berjudul "*Analisis Partisipasi politik Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)* Tahun 2015.<sup>17</sup> Hasil penelitian dan pembahasan ini selaras dengan mekanisme pemilihan umum anggota dewan secara langsung mengikuti regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan skripsi saya membahas tentang bagaimana strategi kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Jurnal oleh Tia Subekti tentang "*Partisipasi Politik Publik dalam Pemilihan Umum*". Kajian ini berpusat pada partisipasi politik masyarakat pada umumnya dalam pemilu, khususnya melihat pergantian pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013.<sup>18</sup> Konsekuensi dari penelitian ini adalah pertama, ada upaya dari KPUD, kelompok ideologis, komunikasi luas, dan masyarakat umum dalam memperluas partisipasi politik. Kedua, objektivitas masyarakat memberikan dampak yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Konsentrasi ini juga menjelaskan bahwa peran lembaga sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperluas partisipasi politik publik, di mana yayasan sosial yang dimaksud adalah, KPUD, Partai Politik,

---

<sup>17</sup>Hamim Suyanto, *Analisis Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014*, Skripsi, (Universitas Wahid Hasyim, 2013).

<sup>18</sup>Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*, Jurnal, (Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014), h. 78.

Media Massa, dan Organisasi kemasyarakatan. Sedangkan skripsi saya membahas tentang peran kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa.

4. Tesis Pertama Yul Asmara Pane Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, observasi ini berjudul "*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 di Kota Padangsidempuan*".<sup>19</sup> Penelitian ini mengkaji penyebab rendahnya partisipasi politik terbuka pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013 di kota Padangsidempuan, dan menemukan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Sedangkan Skripsi saya membahas tentang bagaimana peran kelompok tani desa Pangkalan Lunang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa Pangkalan Lunang.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk mendapatkan keterbukaan yang nyata terkait dengan faktor-faktor penelitian.

Seperti yang ditunjukkan oleh Strauss dan Corbin (1990) penelitian kualitatif adalah semacam penelitian yang prosedur penelitiannya tidak menggunakan angka atau kuantitatif. Untuk keadaan saat ini, metode kualitatif adalah pemeriksaan kehidupan, cerita, perilaku, serta fungsi organisasi, pergantian peristiwa sosial, atau hubungan timbal balik seseorang.<sup>20</sup>

Penelitian yang jelas dan abstrak menekankan pada validitas (kebenaran yang sebenarnya), tidak diambil dari teori tetapi dari kenyataan seperti apa nilainya di lapangan atau sepanjang hasil ini menampilkan kenyataan yang benar-benar terjadi di tempat atau masyarakat tertentu.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup>Pertama Yul Asmara Pane. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Di Kota Padangsidempuan*, ( Tesis, Universitas Sumatra Utara).

<sup>20</sup>Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citipustaka Media. 2012), h. 29.

<sup>21</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XIV (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), h. 16

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian partisipatoris sebagai tambahan dalam memperkaya metode penelitian, beberapa tahapan penelitian partisipatoris bersinggungan dengan penelitian geografi manusia atau geografi sosial. Penelitian partisipatoris adalah penelitian yang mengkaji aspek sosial, ekonomi, dan politik, yang semuanya dilakukan dengan tujuan akhir untuk menjawab persoalan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis dapat terjun langsung berpartisipasi untuk melakukan penelitian melihat masalah sosial dan bentuk perubahan sosial yang ada di lapangan.<sup>22</sup>

## **2. Penentuan Subjek dan Obyek Penelitian**

Penetapan Subjek dan Obyek Penelitian perlu menggunakan kriteria tertentu. Peneliti juga perlu menjelaskan dari mana ia mulai mengumpulkan data, siapa sumber utama, siapa sumber kunci dan siapa sumber tambahan. Adapun sumber atau obyek penelitian di sini adalah:

- a) Kepala Desa
- b) Sekretaris Desa
- c) Kepala Dusun
- d) Ketua Kelompok Tani (3 orang)
- e) Tokoh Masyarakat setempat (4 orang)

Sumber yang dipilih oleh peneliti tergantung pada aturan tertentu, khususnya individu yang memiliki pengaruh besar dalam kelompok petani, serta individu yang lebih memperhatikan keadaan sosial atau partisipasi politik warga Desa Pangkalan Lunang. Kantor kepala desa dimanfaatkan sebagai saksi eksplorasi, khususnya sebagai tempat pengambilan informasi pemilih terkini dalam pemilu di Desa Pangkalan Lunang, untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

## **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>22</sup>Muhammad Dimiyati, *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi* (Jakarta: UI Publishing, 2022), h. 107.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Metode Observasi**

Observasi atau pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu seperti alat-alat tulis, dan lain sebagainya. Peneliti turun langsung menuju ke wilayah penelitian dengan mengamati dan memperhatikan pada isu dan pertemuan yang terjadi di wilayah penelitian, yang dinilai berdampak pada pekerjaan kelompok tani Desa Pangkalan Lunang, pada kerja sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah setempat.

##### **b. Metode wawancara**

Metode wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan kepada informan penelitian. Orang yang diwawacarai dalam penelitian ini adalah; Kepala desa, tokoh wilayah setempat, dan ketua kelompok tani di Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan langkah reduksi data, yaitu data yang didapat di lapangan secara langsung dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini, terdiri dari empat bagian, di mana setiap bab akan dijelaskan secara lengkap, singkat dan jelas dengan tujuan agar sebagai seorang peneliti sekaligus penulis dan pembaca dapat membaca dengan mudah. Berikutnya adalah lima bagian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang menggambarkan seluruh penelitian ini, Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran keseluruhan wilayah desa Pangkalan Lunang, Labuhanbatu Utara yang mencakup wilayah geologis.

Bab III Pemahaman Terhadap Kelompok dan Partisipasi Politik Masyarakat bab ini menjelaskan teori tentang kelompok dan partisipasi politik masyarakat.

Bab IV, membahas Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, bab ini menjelaskan beberapa aspek yang terdiri dari; Bagaimana kedudukan kelompok tani dalam kerjasama partisipasi politik masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, serta bagaimana cara kelompok tani memotivasi anggotanya dalam melaksanakan aktivitas politik.

Bab V merupakan bab penutup, bab ini beberapa sub bab yaitu kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dari penulis, juga pada akhir pembahasan ini, penulis mencantumkan daftar pustaka sebagai dasar literature dalam pembahasan skripsi ini.